

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, RASIO KEMANDIRIAN DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Maisy Martha Dianti¹Herawati¹

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : maisydianti2000@gmail.com

ABSTRAK

Semakin meningkatnya tuntutan untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik dalam laporan keuangan, memberikan signal kepada pemerintah agar memberikan informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, rasio kemandirian dan ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah 34 laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun anggaran 2018-2020 dengan menggunakan metode sampling jenuh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 26. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan jumlah penduduk, rasio kemandirian dan ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.

Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Kemandirian dan Ukuran Legislatif .

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya tuntutan untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik dalam laporan keuangan, memberikan signal kepada pemerintah sektor publik agar memberikan informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangannya. ^[11]

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam menginformasikan laporan keuangan adalah dengan pengungkapan lengkap laporan keuangan. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengungkapan laporan keuangan terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), bahwa laporan keuangan harus memuat tujuan dari Laporan

Keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Pengungkapan atau transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Karakteristik Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian dan Ukuran Legislatif. Pertama, Karakteristik Pemerintah Daerah pada penelitian ini, Karakteristik Pemerintah Daerah di proksikan dengan Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan manusia. Jumlah Penduduk diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah karena jumlah penduduk merupakan kompleksitas dari suatu daerah. Sebagaimana didalam hasil penelitian Naopal^[9] mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota adalah sebesar 55%, sejalan dengan penelitian Utami dan Sulardi^[15], Andriani et al.^[3] dan Budiarto & Indarti^[4].

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan tolak ukur untuk tinggi rendahnya kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Hal ini diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan hasil penelitian Faruqi^[6], Najah dan Purwati^[8] dan Jessica dan Suhartono^[9] yang memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketiga, Rasio Kemandirian, rasio ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan kontribusi dari masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dimana pada penelitian Rizta^[12] dan Albab^[1] memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Keempat, Ukuran Legislatif atau yang biasa disebut DPR/DPRD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran dengan benar. Hal ini diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andriani et al.^[3], Falikhatun et al.^[5], Rizta^[12] dan Simbolon dan Kurniawan^[14].

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris tentang konsistensi persentase tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dibandingkan penelitian sebelumnya serta untuk membuktikan konsistensi pengaruh variabel independen (dalam hal ini Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Kemandirian dan Ukuran Legislatif) terhadap Tingkat Pengungkapan

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masih kurangnya penelitian mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan disektor pemerintahan akibat sulitnya memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan, dan cenderung rahasia, serta motif yang mendasari pengungkapan cenderung sulit untuk dikembangkan.

METODE

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintahan Provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 34 laporan keuangan, dengan teknik pengambilan sampel sampling jenuh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari situs Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 26. Sebagai prasyarat dalam analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi tersebut terdiri dari uji asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koef. Regresi	Sig.	Hasil
POP	1,476	0,257	Ditolak
IPM	0,008	0,011	Diterima
RK	0,056	0,259	Ditolak
LEG	-0,001	0,272	Ditolak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan hasil bahwa variabel Jumlah Penduduk (POP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak tidaknya populasi suatu provinsi tidak

akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tersebut, akan tetapi lebih kepada bagaimana kompleksitas suatu daerah itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amaliah^[2] bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti jika indeks pembangunan manusia suatu provinsi mengalami peningkatan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pada provinsi tersebut juga akan mengalami peningkatan dan juga berlaku sebaliknya. Dengan kata lain jika indeks pembangunan masyarakat suatu provinsi tersebut tinggi, maka akan semakin beragam keinginan masyarakat yang ingin terpenuhi, sehingga menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah, dimana pemerintah harus memberikan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih rinci. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Faruqi^[6], Najah dan Purwati^[8], Jessica dan Suhartono^[9] mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian (RK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. berdasarkan hasil data penelitian ini menunjukkan rerata rasio kemandirian hanya sebesar 27,8 %. Artinya lebih dari 70% pendanaan pemerintah daerah provinsi masih bergantung pada selain pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dari dana transfer pemerintah pusat dan pembiayaan. Masih rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi tersebut kemungkinan dapat menyebabkan pemerintah tidak begitu antusias untuk melakukan pengungkapan penuh terhadap laporan

keuangannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami & Sulardi^[15] dan Simbolon dan Kurniawan^[14] bahwa rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ukuran Legislatif (LEG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak atau tidaknya jumlah anggota legislatif suatu pemerintah provinsi tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tersebut, akan tetapi lebih kepada bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota legislatif itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri^[13], Andriani et al.^[3] serta penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun et al.^[5] bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran pada penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Serta sebaiknya menambahkan rentang waktu yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albab, M. U. (2019). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016). *Skripsi*, candra maulana.
- [2] Amaliah, E. F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- [3] Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14.
- [4] Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- [5] Falikhatun, F., Wahyuni, S., Niswah, M. A., & Nilasakti, A. O. (2020). Financing Type And Sustainability Reporting: Financial Performance As Mediating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(1), 34–45.
- [6] Faruqi. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Ukuran Legislatif, Tingkat Penyimpangan Dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Akuntansi dan Manajemen*.
- [7] Jessica, N., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018). *Akuntansi Keuangan*, 9(021), 14–27.
- [8] Najah, U., & Purwati, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kualitas Hasil Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(2), 70–88.
- [9] Naopal, rahayu dan Y. (2017). *Effectiveness of Public Sector Audit Reports in Indonesia (Preceding and Following Audit Reform)*. 1–381.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [11] Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111–1130.
- [12] Rizta, Naswa Afra. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- [13] Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
- [14] Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Modus*, 30(1), 54–70.
- [15] Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253.